

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arief Hakim, 2007, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Jember: Cetakan I.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- AR. Sujono, 2011, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta
- Bambang Hariyono, 2009, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Penelitian Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dwi Adi K, 2001, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya.
- Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Firman Freddy Busroh, 2015, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Cintya Press

Harifin A. Tumpa, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.

Kunarto, Tri Barta Catur Prasetya, 2001, *Sejarah Prespektif dan Prospeknya*, Jakarta: Cipta Manunggal

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: L Andi Press.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta: CV. Restu Agung.

Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya.

Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Legality.

Salim H.S, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung: Angkasa.

\_\_\_\_\_, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta: Erlangga.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Syaefurrahman Al-banjary, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta: Restu Agung.

Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing.

Zainuddin Ali, M.A., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HM.05.02 Tahun 2014 Nomor: B/4/III/2014 tentang Kerjasama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba.

Pedoman Kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PAS-05-HM.05.02. Tahun 2016 Nomor: B/11/II/2016 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan.

### C. Jurnal

I Gede Artha, 2015, *Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.3: 588-602

### D. INTERNET

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/19/50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dalam-lapas>

<https://tribatanews.sumbar.polri.go.id/index.php/2018/05/22/polisi-bekuk-napi-lp-ii-b-pariaman-diduga-pengedar-narkoba/>

<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>

<https://daerah.sindonews.com/reas/1196224/22/42-paket-sabu-dan-2-ponsel-gagal-diselundupkan-ke-lapas-kedunpane-1491903975/>

<https://nasional.sindonews.com/read/1127165/13/sepak-terjang-freddy-budiman-1469764275>

[https://mediaindonesia.com/amp/amp\\_detail/34826-narkoba-diduga-marak-beredar-di-lp-muara-padang](https://mediaindonesia.com/amp/amp_detail/34826-narkoba-diduga-marak-beredar-di-lp-muara-padang)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian-resor>